

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan seringkali dikaitkan dengan pendapatan rendah. Dalam menanggulangi masalah ini, diperlukan solusi dan strategi (Ikejiaku, 2009). Ozughalu (2016) menyatakan kemiskinan menjadi tantangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara, sehingga dapat menghambat pembangunan ekonomi negara tersebut (Kuncoro, 2015). Menurut Kuncoro (2015), beberapa faktor ekonomi yang menyebabkan kemiskinan termasuk ketimpangan dalam distribusi pendapatan akibat ketidaksetaraan kapasitas sumber daya individu dan kelompok penduduk,

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki persentase kemiskinan tertinggi. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam untuk merumuskan kebijakan yang tepat dalam mengurangi kemiskinan di DIY.

TABEL 1.1
Kemiskinan Berdasarkan Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2017-2022 (%)

Provinsi	2017	2018	2019	2020	2021	2022
D.I. Yogyakarta	12,36	11,81	11,44	12,80	11,91	11,49
Jawa Tengah	12,23	11,19	10,58	11,84	11,25	10,98
Jawa Timur	11,20	10,85	10,20	11,46	10,59	10,49
Jawa Barat	7,83	7,25	6,82	8,43	7,97	7,98
Banten	5,59	5,25	4,94	6,63	6,50	6,24
DKI Jakarta	3,78	3,55	3,42	4,69	4,67	4,61

Sumber: BPS Indonesia

Dari Tabel 1.1. Provinsi DIY memiliki persentase kemiskinan tertinggi setiap tahunnya dibandingkan dengan Provinsi lainnya. Persentase kemiskinan tertinggi yaitu tahun 2020 sebesar 12,80%. Pada tahun 2022, persentase kemiskinan

di DIY mengalami penurunan menjadi 11,49%. Jika dilihat dari angka kemiskinan relatif tinggi karena angka diatas 10 persen (Yosa, 2022).

TABEL 1.2
Jumlah Penduduk Miskin Berdasarkan Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2017-2022
(Ribu Jiwa)

Provinsi	2017	2018	2019	2020	2021	2022
D.I. Yogyakarta	466,33	450,25	440,89	503,14	474,49	463,63
Jawa Tengah	4197,49	3867,42	3679,40	4119,93	3934,01	3858,23
Jawa Timur	4405,27	4,292,15	4056,00	4585,97	4259,60	4236,51
Jawa Barat	3774,41	3539,40	3375,89	4188,52	4004,86	4053,62
Banten	699,83	668,74	641,42	857,64	852,28	829,66
DKI Jakarta	393,13	372,26	362,30	496,84	498,29	494,93

Sumber: BPS Indonesia

Dari Tabel 1.2. Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi setiap tahunnya dibandingkan dengan Provinsi lainnya. Jumlah penduduk miskin tertinggi di Jawa Timur yaitu pada tahun 2020 sebanyak 4.585,97 ribu jiwa. DIY menempati peringkat 5 pada jumlah penduduk miskin, walaupun memiliki persentase kemiskinan tertinggi di pulau jawa, akan tetapi DIY masih memiliki jumlah penduduk miskin yang lebih sedikit dibandingkan Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten.

TABEL 1.3
Kemiskinan Berdasarkan Kabupaten/kota di DIY Tahun 2017-2022 (%)

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022
D.I. Yogyakarta	13,02	12,13	11,70	12,28	12,80	11,34
Kulonprogo	20,03	18,30	17,39	18,01	18,38	16,39
Bantul	14,07	13,43	12,92	13,50	14,04	12,27
Gunungkidul	18,65	17,12	16,61	17,07	17,69	15,86
Sleman	8,13	7,65	7,41	8,12	8,64	7,74
Yogyakarta	7,64	6,98	6,84	7,27	7,64	6,62

Sumber: BPS Provinsi DIY

Dari Tabel 1.3. Kabupaten Kulonprogo, Bantul, Gunungkidul, dan Sleman memiliki persentase kemiskinan yang tinggi. Persentase kemiskinan tertinggi rata-rata terjadi pada tahun 2017, diantaranya yaitu Kulonprogo sebesar 20,03%, Bantul

14,07%, dan Gunungkidul 18,65%. Sleman memiliki persentase kemiskinan tertinggi pada tahun 2021 sebesar 8,64%.

Angka kemiskinan di DIY tercatat 11,70% atau lebih tinggi 2,29% dari tingkat kemiskinan Nasional (Salsabilla et al., 2022)

TABEL 1.4
Jumlah Penduduk Miskin Berdasarkan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2017-2022
(Ribu Jiwa)

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022
D.I. Yogyakarta	488,53	460,10	448,47	475,72	506,45	454,76
Kulonprogo	84,17	77,72	74,62	78,06	81,14	73,21
Bantul	139,67	134,84	131,15	138,66	146,98	130,13
Gunungkidul	135,74	125,76	123,08	127,61	135,33	122,82
Sleman	96,75	92,04	90,17	99,78	108,93	98,92
Yogyakarta	32,20	29,75	29,45	31,62	34,07	29,68

Sumber: BPS Provinsi DIY

Dari Tabel 1.4. Kabupaten Kulonprogo, Bantul, Gunungkidul, dan Sleman memiliki penduduk miskin yang tinggi. Jumlah penduduk miskin tertinggi di Kulonprogo sebanyak 84,17 ribu jiwa pada tahun 2017, Bantul sebanyak 146,98 ribu jiwa pada tahun 2021, Gunungkidul sebanyak 135,74 pada tahun 2017, dan Sleman sebanyak 108,93 ribu jiwa pada tahun 2021.

Permasalahan tersebut dapat diatasi oleh Pemerintah setempat dengan memanfaatkan sektor potensial yang ada di DIY. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah:29 sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

“Dia (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untuk kalian, kemudian Dia menuju langit, lalu menyempurnakannya menjadi tujuh lapis langit. Dia maha mengetahui atas segala sesuatu.”

Potensi sektor dalam suatu daerah dapat diidentifikasi dari pendapatan sektor ekonomi dalam PDRB (Suryahadi et al., 2012). Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), sektor-sektor tersebut meliputi pertanian, penggalian dan serta jasa lainnya (BPS DIY, 2022).

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dipengaruhi oleh sektor-sektor tertentu dan berdampak pada daerah sekitarnya dengan keterkaitan ekonomi (Putra dan Saptutyningasih, 2017). Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik secara keseluruhan, fokus pada sektor unggulan atau sektor berpotensi dapat memberikan manfaat lebih besar dibandingkan daerah yang mengembangkan sektor kurang potensial (Putra dan Saptutyningasih, 2017). Struktur PDRB DIY dapat dilihat pada Tabel 1.5 di bawah ini:

TABEL 1.5
PDRB DIY Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2017-2022 (Juta Rupiah)

Sektor	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	7930314,50	8101233,30	8184189,40	8532140,30	8584394,60	9076681,91
Pertambangan dan Penggalian	489349,20	541183,60	557653,50	508376,00	492583,20	501031,83
Industri Pengolahan	11878962,40	12486855,40	13200727,10	12624114,40	12670356,70	12893389,82
Pengadaan Listrik dan Gas	151680,90	156706,50	165217,40	162929,80	166847,10	178219,97
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	90288,80	94923,30	103372,60	103901,00	110988,40	114639,42
Konstruksi	8828648,00	9984760,00	11420640,10	9636836,10	10679271,40	11193381,37
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7787541,30	8219289,30	8643437,90	8254025,20	8379070,20	8783026,07
Transportasi dan Pergudangan	4976405,70	5304843,60	5493402,20	4383207,20	4467910,20	5287738,32
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8788711,30	9383603,30	10217676,90	8489705,70	9130594,70	10263112,08
Informasi dan Komunikasi	10222383,30	10884532,60	11694991,80	13994335,90	16329802,60	16907385,94
Jasa Keuangan dan Asuransi	3303797,60	3506587,60	3804310,90	3763916,10	3818583,10	4018731,06
Real Estat	6708239,40	7079839,30	7499627,40	7594529,50	7637701,20	7853187,57
Jasa Perusahaan	1086911,80	1146811,60	1224235,00	1041993,50	1126300,80	1206945,09
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	6 956541,30	7239151,90	7477921,50	7310590,00	7282364,60	7497262,32
Jasa Pendidikan	8096345,90	8583073,60	9146783,80	9555495,50	10033094,40	10131245,37
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2445240,60	2593233,40	2764571,40	3294799,10	3442202,20	3579579,58
Jasa Lainnya	2558881,60	2717386,10	2887199,80	2432624,90	2956490,10	3412765,44
PDRB	92300243,6	98024014,4	104485458,80	101683520,20	107308555,40	111898323,16

Sumber: BPS Provinsi DIY

Dari Tabel 1.5. nilai PDRB tahun 2017 sampai 2019 meningkat. Tahun 2020 mengalami penurunan, akan tetapi tahun 2021 sampai 2022 nilai PDRB Kembali mengalami peningkatan.

Faktor Produksi pertanian yang paling utama adalah tanah. Di lahan pertanian, kadar hara tanah merupakan fungsi dari bahan induk, iklim, topografi, organisme, vegetasi, dan waktu (Susanto, 2005).

TABEL 1.6
Luas Pemanfaatan Lahan Pertanian Provinsi DIY

Pemanfaatan Lahan Pertanian	Luas (Ha)
Lahan Sawah	52172,50
Sawah Irigasi	43009
Sawah Tadah Hujan/Non Irigasi	9163,50
Lahan Pertanian Bukan Sawah	187308,70
Tegal/Kebun	103745,90
Lahan yang sementara tidak diusahakan	1766
Lainnya (Perkebunan/Hutan Rakyat/Tambak/Kolam/Tebat/Empang)	81710,80
Lahan/Huma	86
Jumlah	239481,20

Sumber: Bappeda Provinsi DIY

Dari Tabel 1.6 jumlah total dari luas pemanfaatan lahan pertanian di Provinsi DIY pada tahun 2019 yaitu 239.481,20 Ha. Malingreau (1981) menyatakan penggunaan lahan merupakan campur tangan manusia untuk memenuhi kebutuhan.

Selain pertanian menjadi salah satu sektor potensial, DIY juga memiliki keistimewaan berupa kewenangan dalam hal pertanahan. Tanah Sultan atau Sultan Ground merupakan aset berupa tanah yang dimiliki oleh kasultanan DIY, yang mana Tanah Sultan tersebut adalah tanah adat peninggalan lembaga keraton DIY. Kasultanan dan Kadipaten berwenang mengatur, mengelola, dan memanfaatkan tanah tersebut untuk kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. (Perdais DIY 2, 2017).

TABEL 1.7

Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Tanah Desa yang Terfasilitasi untuk Dikelola serta Dimanfaatkan Tahun 2019-2023 (% dan Bidang)

Elemen	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Penataan Ruang pada Kawasan Keistimewaan	37,00	n/a	n/a	n/a	n/a
Bidang SG, PAG, dan TKD yang Memiliki Kepastian Hukum	2250	n/a	n/a	n/a	n/a
Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap RT/RW Provinsi Meningkatkan (IKU)	77,62	78,95	81,04	82,62	82,62
Capaian Penataan Ruang pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan (Kinerja Pemda)	29,17	40,69	51,81	55,29	55,29
Bidang SG, PAG, TKD yang Terfasilitasi untuk Dikelola serta Dimanfaatkan	8744	10729	15335	22242	22242
Persentase Tertib Administrasi SG, PAD, dan TKD	44,72	50,08	74,11	98,12	98,12
Persentase Dukungan Program Pemda terhadap Keterwujudan Struktur dan Pola Ruang	75,20	66,26	78,66	80,26	80,26

Sumber: Dinas Pertanian dan Tata Ruang DIY

Dari Tabel 1.7. Penataan ruang pada kawasan Keistimewaan memiliki persentase sebesar 37,00% pada tahun 2019. SG, PAG, dan TKD memiliki kepastian hukum terdapat sebanyak 2.250 bidang pada tahun 2019. Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RT/RW Provinsi meningkat memiliki persentase tertinggi pada tahun 2022 dan 2023 sebesar 82,62%. SG, PAG, dan TKD yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan memiliki jumlah bidang yang terus meningkat setiap tahunnya, jumlah bidang terbanyak yaitu pada tahun 2022 dan 2023 sejumlah 22.242 bidang. Tertib administrasi SG, PAD, dan TKD memiliki persentase tertinggi pada tahun 2022 dan 2023 sebesar 98,12%..

Berdasarkan data yang peneliti temukan, diketahui bahwa dengan adanya sektor potensial seperti tanah Sultan, hal ini akan menjadi potensi dalam peningkatan perekonomian masyarakat DIY. Untuk itu, peneliti tertarik untuk

mengetahui potensi dari Tanah Sultan sebagai salah satu cara dalam meningkatkan perekonomian masyarakat DIY.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi kemiskinan di DIY?
2. Bagaimana kondisi Tanah Sultan di lokasi sampel penelitian?
3. Bagaimana pemanfaatan Tanah Sultan yang telah dilakukan masyarakat di lokasi sampel penelitian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian dalam karya tulis ini. Yaitu:

1. Mengetahui kondisi kemiskinan di DIY
2. Mengetahui kondisi Tanah Sultan di lokasi sampel penelitian.
3. Mengetahui bentuk dari pemanfaatan Tanah Sultan yang telah dilakukan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan perekonomian di lokasi sampel penelitian.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis, diantaranya adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu untuk mengembangkan teori dan memperluas pengetahuan, serta informasi ilmiah dalam pengembangan ilmu

pengetahuan mengenai pemanfaatan potensi aset Tanah Sultan yang ada di lokasi sampel penelitian.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan Tanah Sultan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi peneliti selanjutnya.